ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PENYALURAN KREDIT KEPADA UMKM TERHADAP PERTUMBUHAN KREDIT DI PROVINSI SULAWESI UTARA

James Jollen Lumintang¹, Vekie A.Rumate², Debby Ch. Rotinsulu³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Universitas Sam Ratulangi

ABSTRAK

Dunia usaha tidak terlepas dari turbulensi dan resiko keuangan, dalam perkembangan UMKM resiko menjadi lebih tinggi karena aset yang kecil membuat dana usaha habis dalam pembayaran kewajiban kredit, terutama saat inflasi dan suku bunga tinggi. Kenaikan inflasi dan suku bunga akan membuat biaya keuangan dalam usaha semakin tinggi, sehingga dapat berpengaruh pada kelangsungan usaha. Selain itu, permodalan merupakan tantangan yang paling penting dalam usaha pengembangan UMKM. Faktor modal bagi UMKM menjadi penting, sebab UMKM seringkali mendapatkan peluang usaha yang cukup besar. Namun, kondisi permodalan yang minim membuat UMKM tidak dapat mengembangkan usahanya lebih jauh lagi. Peranan penting lainnya adalah UMKM mendorong munculnya wirausaha-wirausaha baru. Wirausaha memiliki dua fungsi dalam perekonomian suatu negara yaitu fungsi makro dan mikro serta menengah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Kebijakan Dampak Penyaluran Kredit Kepada UMKM berpengaruh terhadap pertumbuhan Kredit di Provinsi Sulawesi Utara.

Penelitian menggunakan penelitian assosiatif dengan teknik analisis data menggukana analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan penyaluran kredit tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan kredit UMKM di Sulawesi Utara. Saran yang dapat diberikan adalah Bank Indonesia perlu menurunkan tingkat bunga kredit agar pertumbuhan kredit dapat mengalami peningkatan, Pihak bank sebaiknya memberikan kelonggaran untuk kredit UMK, Pemerintah sebaiknya membantu dalam hal memberikan modal bagi UMKM dan membuka akses UMKM untuk mendapatkan modal usaha

Kata kunci: kebijakan kredit, pertumbuhan kredit

ARSTRACT

The business world is inseparable from turbulence and financial risk, in the development of MSMEs the risk is higher because small assets make business funds run out in payment of credit obligations, especially when inflation and high interest rates. The increase in inflation and interest rates will make the financial costs of the business higher, so that it can affect the sustainability of the business. In addition, capital is the most important challenge in developing MSMEs. The capital factor for MSMEs is important, because MSMEs often get considerable business opportunities. However, the lack of capital makes the MSMEs unable to expand their business further. Another important role is that MSMEs encourage the emergence of new entrepreneurs. Entrepreneurship has two functions in the economy of a country, namely macro and micro and medium functions. The purpose of this study was to determine the effect of the Impact Policy on Credit Distribution to MSMEs affecting the growth of Credit in North Sulawesi Province.

The study used associative research with data analysis techniques using simple linear regression analysis. The results showed that the credit distribution policy did not affect the growth of MSME loans in North Sulawesi. The advice that can be given is that Bank Indonesia needs to reduce the loan interest rate so that credit growth can increase. Banks should provide concessions for MSE loans. The government should help in providing capital for MSMEs and open access for MSMEs to obtain business capital.

Keywords: credit policy, credit growth

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Adanya kebijakan Bank Indonesia yang tertuang dalam PBI no. 14/22/PBI/2012 dan telah diubah menjadi PBI no. 17/12PBI/2015 pasal 2 ayat 3 : sampai dengan tahun 2014 pembiayaan kredit UMKM terhadap total kredit sesuai kemampuan atau rencana bisnis Bank. Tahun 2015 `pembiayaan kredit UMKM terhadap total kredit adalah sebesar paling rendah 5% dari total kredit. Tahun 2016 pembiayaan kredit UMKM terhadap total kredit adalah sebesar paling rendah 10% dari total kredit. Tahun 2017 pembiayaan kredit UMKM terhadap total kredit adalah sebesar paling rendah 15% dari total kredit. Tahun 2018 pembiayaan kredit UMKM terhadap total kredit adalah sebesar paling rendah 20% dari total kredit.

Keberadaan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia sudah tidak diragukan lagi. Daya tahannya dalam menghadapi krisis ekonomi yang beberapa kali melanda juga sudah teruji. Ketahanan tersebut diantaranya disebabkan oleh UMKM tidak memiliki ketergantungan pada bahan baku impor maupun modal dari asing sehingga ketiga terjadi pelemahan mata uang rupiah, mereka tidak terdampak. Bahkan banyak di antara UMKM tersebut menjadi penopang ekspor. Baik melalui ekspor langsung ataupun sebagai penyedia bahan baku yang selanjutnya hasil jadinya diekspor. Di samping itu, mayoritas pelaku UMKM menyediakan produk maupun jasa dengan harga yang relatif murah. Dengan demikian saat terjadi penurunan daya beli masyarakat akibat adanya krisis, UMKM justru memperoleh efek positif.

Dalam dunia usaha tidak terlepas dari turbulensi dan resiko keuangan, dalam perkembangan UMKM resiko menjadi lebih tinggi karena aset yang kecil membuat dana usaha habis dalam pembayaran kewajiban kredit, terutama saat inflasi dan suku bunga tinggi. Kenaikan inflasi dan suku bunga akan membuat biaya keuangan dalam usaha semakin tinggi, sehingga dapat berpengaruh pada kelangsungan usaha. Selain itu, permodalan merupakan tantangan yang paling penting dalam usaha pengembangan UMKM. Faktor modal bagi UMKM menjadi penting, sebab UMKM seringkali mendapatkan peluang usaha yang cukup besar. Namun, kondisi permodalan yang minim membuat UMKM tidak dapat mengembangkan usahanya lebih jauh lagi.

Menurut data yang disampaikan oleh Kementrian Koperasi dan UMKM dalam Perkembangan Data Usaha Mikro , Kecil , Menengah (UMKM) Dan Usaha Besar (UB) seperti yang terdapat dalam www.depkop.go.id, no. 1 (2012): 2011–12, hingga tahun 2013, proporsi sektor usaha yang masuk dalam kategori UMKM pada total unit usaha yang terdaftar cukup besar. Jumlah UMKM tercatat sebesar 57.895.721 sementara unit usaha yang masuk dalam kategori unit usaha besar hanya sebanyak 5.066 unit usaha. Demikian juga dengan kemampuan untuk menampung jumlah tenaga kerja. Unit usaha besar mempekerjakan pegawai sebesar 3.537.162 tenaga kerja, sementara tenaga kerja yang bekerja untuk sektor UMKM mencapai 114.144.082. Data tersebut menunjukkan dari total tenaga kerja yang ada di Indonesia, 97% diantaranya bekerja untuk sektor UMKM. Sedangkan jika melihat dari komposisi terhadap PDB harga berlaku, sektor UMKM menyumbang sebesar 60,34% sisanya yaitu sebesar 39,66% merupakan sumbangsih dari sektor usaha besar. Jika melihat dari sisi ekspor non migas yang dilakukan oleh UMKM, maka proporsi mereka sebesar 15,68% dan sebanyak 85,94% ekspor non migas dilakukan oleh usaha besar.

Kristiyanti (2012) mengungkapkan peranan strategis yang dimiliki UMKM dalam pembangunan ekonomi nasional. UMKM berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangun. Pada saat terjadi krisis, UMKM berperan dalam membantu pemulihan ekonomi. Hal ini disebabkan karena sektor UMKM lebih mudah dimasuki oleh pelaku-pelaku usaha baru. Selain itu, UMKM berdampak sosial bagi masyarakat. Diantaranya dalam menyerap pengangguran dan mengatasi hilangnya penghasilan di masyarakat. Beck, Demirguc-Kunt and Levine (2005) menyimpulkan adanya pengaruh yang signifikan dan positif dari UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi. Kesimpulan ini diperoleh setelah melakukan penelitian pada 45 negara di dunia.

Peranan penting lainnya adalah UMKM mendorong munculnya wirausaha-wirausaha baru. Wirausaha memiliki dua fungsi dalam perekonomian suatu negara yaitu fungsi makro dan mikro. Pada peranan makro, wirausaha berfungsi sebagai penggerak, pengendali dan pendorong perekonomian suatu

bangsa. Seluruh usaha, baik itu usaha besar maupun UMKM dimulai dari ide awal yang diimplementasikan oleh wirausaha. Pada UMKM, fungsi ini dapat bergerak lebih cepat karena kemudahan dalam memasuki industri. Inovasi dan ide kreatif lebih mudah untuk diterapkan dibandingkan jika bergerak di usaha besar. Dimana pada umumnya memiliki jalur birokrasi dan prosedur yang lebih rumit. Sementara pada sisi mikro, fungsi wirausahawan dalam perusahaan mencakup menanggung risiko dan ketidakpastian, mengkombinasikan sumber-sumber ke dalam cara yang baru dan berbeda, menciptakan nilai tambah, menciptakan usaha-usaha baru, dan pencipta peluang-peluang baru (Suryana, 2013). Kesimpulan yang kurang lebih sama ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Hadiyati (2011). Kreativitas dan inovasi memegang peranan yang penting dalam mengembangkan semangat kewirausahaan di kalangan pelaku UMKM.

Melihat akan hal tersebut, pemerintah mendukung penuh UMKM dengan berkomitmen mengembangkan UMKM. Komitemen tersebut diantaranya ditunjukkan melalui program pembiayaan yang khusus ditujukan bagi UMKM. Salah satu diantaranya dan merupakan yang terbaru digulirkan oleh pemerintah adalah PBI No. 14/22/PBI/2012 dimana regulator mewajibkan bank untuk menyalurkan kredit kepada UMKM, minimal 20% dari keseluruhan pembiayaan/kredit. Jumlah ini harus dipenuhi oleh seluruh bank paling lambat pada tahun 2018. Untuk pemenuhan persyaratan tersebut, Bank Indonesia memberikan kesempatan kepada perbankan untuk memenuhi secara bertahap. Dimulai pada tahun 2013, hingga mencapai 20% dari total pembiayaan pada tahun 2018. Berikut jumlah adalah jumlah UMKM di Sulawesi Utara:

Tabel 1 Jumlah Kredit UMKM di Provinsi Sulawesi Utara

Kredit		2016 2017		2018	
		Desember	Desember	Desember	
		UMKM	UMKM	UMKM	
Provinsi	Kab. Bolaang	13,144,541,631	48,558,616,606	40,236,111,888	
Sulawesi	Mongondow				
Utara	Kab. Bolaang	7,226,669,446	7,095,085,118	8,174,931,717	
	Mongondow Selatan	. 6 - 3	1,50		
	Kab. Bolaang	12,057,129,788	35,891,411,663	28,609,557,136	
	Mongondow Timur				
	Kab. Bolaang	4,740,582,965	15,870,553,952	13,433,609,818	
	Mongondow Utara				
	Kab. Kepul <mark>au</mark> an	651,355,271,979	717,767,306,565	749,355,418,071	
	Sangihe				
	Kab. Kepulauan Sitaro	5,056,514,837	17,169,549,686	18,085,719,625	
	Kab. kepulauan	5,570,682,147	23,745,271,591	17,991,813,412	
	Talaud FAZIII		- N DICNIS		
	Kab. Minahasa	733,458,064,185	834,740,180,070	921,501,029,582	
	Kab. Minahasa	5,302,733,923	34,947,727,897	29,607,801,574	
	Selatan	VI MAGISTER I	MO EVO.		
	Kab. Minahasa	2,897,186,635	15,780,416,310	13,088,717,848	
	Tenggara				
	Kab. Minahasa Utara	4,804,418,008	12,280,937,949	18,824,300,688	
	Kota Bitung	907,369,850,984	1,098,076,934,757	1,299,633,170,846	
	Kota Kotamobagu	817,338,870,900	1,018,236,246,538	1,186,030,506,842	
	Kota Manado	5,083,965,051,812	5,075,369,323,837	5,466,810,597,097	
	Kota Tomohon	7,383,602,354	128,915,630,875	179,906,503,256	
	Total	8,261,671,171,594	9,084,445,193,414	9,991,289,789,400	

Sumber: Bank Indonesia, 2019

Tabel 1 menunjukkan besaran kredit dari UMKM di Sulut perkabupaten dan kota. Dapat dilihat bahwa setiap tahunnya dari tahun 2016-2018 jumlah kredit mengalami peningkatan. Dapat dilihat bahwa besaran kredit tertinggi adalah kredit untuk kota Manado dan jumlah kredit terendah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Hal tersebut dikarenakan akses ke Bank lebih dimudahkan masyarakat yang berdomisili di Manado karena jumlah bank yang begitu banyak sehingga akses untuk mendapatkan kredit lebih terbuka. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti *Analisis Dampak Kebijakan Penyaluran Kredit Kepada UMKM Terhadap Pertumbuhan Kredit di Provinsi Sulawesi Utara.*

Rumusan Masalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, rumusan permasalahan yang coba untuk dipecahkan pada penelitian ini adalah apakah Dampak Kebijakan Penyaluran Kredit Kepada UMKM berpengaruh terhadap pertumbuhan Kredit di Provinsi Sulawesi Utara?

Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Dampak Kebijakan Penyaluran Kredit Kepada UMKM berpengaruh terhadap pertumbuhan Kredit di Provinsi Sulawesi Utara.

Manfaat Penelitian

- 1. Bagi UMKM hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengembangkan strategi untuk operasionalisasi UMKM serta hal yang berkaitan dengan pembiayaan.
- 2. Bagi penulis sendiri diharapkan kajian ini dapat memperluas wawasan tentang kredit dan pertumbuhan kredit UMKM.

Bagi Pemerintah, dapat menjadi acuan untuk bahan pengambilan keputusan dalam menyiapkan formulasi pembiayaan UMKM.

Tinjauan Pustaka Landasan Teori

Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, kriteria usaha kecil dilihat dari segi keuangan dan modal yang dimilikinya (Titik Sartika Partomo dan Abd. Rachman Soedjoedono, 2002): (1) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha), atau (2) memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 1 miliar/tahun. Untuk kriteria usaha menengah: (1) untuk sektor industri, memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 600 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; (3) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 3 miliar. Berkaitan dengan beberapa definisi yang berbeda tersebut untuk kepentingan survei ini, akan digunakan batasan yang digunakan oleh Bank Indonesia dan BPS karena kedua batasan ini sering digunakan untuk kepentingan pengambilan kebijakan.

Secara berurut, batasan profil UMKM dan pembiayaan sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Usaha Mikro:

Usaha produktif milik keluarga atau perorangan warga negara Indonesia; Memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 100 juta per tahun; Fasilitas kredit yang dapat di berikan maksimal plafond sebesar Rp. 50 juta.

2. Usaha Kecil:

Usaha produktif milik warga negara Indonesia, yang berbentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha berbadan hukum termasuk koperasi;

Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar; Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1 miliar; Fasilitas kredit yang dapat diberikan yaitu plafond > Rp. 50 juta s/d Rp. 500 juta.

3. Usaha Menengah:

Usaha produktif milik warga negara Indonesia yang berbentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha berbadan hukum termasuk koperasi;

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 200 juta s/d 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; Fasilitas kredit yang dapat diberikan yaitu plafond > Rp. 500 juta s/d Rp. 5 miliar.

Pengertian Bank, Kredit dan Modal Pengertian Bank

Bank, menurut *Undang-Undang pokok perbankan No.14 Tahun 1967*, didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Menurut *Abdurachman* (1963: 80) Bank merupakan salah satu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan salah satu jasa beraneka ragam seperti pinjaman, memberi pinjaman, mengedarkan mata uang, mengadakan pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan bendabenda berharga, membiayai usaha-usaha perusahaan dan lain-lain sebagainya.

Menurut *Winardi* (1996: 23) Bank merupakan suatu lembaga untuk meminjam uang, mengeluarkan uang kertas atau membantu menyimpan uang.

Pengertian Kredit

Kredit artinya percaya, berasal dari kata latin Credere yaitu menempatkan kepercayaan, jadi di dalamnya termasuk pengertian kerpercayaan baik yang diberikan maupun diterima (Susatyo Reksodiprojo, 1980 : 202).

Pengertian Modal

Modal atau Capital menurut Abdurachman A. (1963: 157):

- 1. Pada umumnya ialah kekayaan, terutama dalam bentuk harta benda atau perlengkapan yang dapat dipakai dalam produksi atau penciptaan nilai.
- 2. Dalam bidang keuangan terutama working capital ialah kapital yang dipakai dalam menjalankan perusahaan, untuk membeli bahan baku, membayar upah tenaga kerja dan sebagainya.

Menurut Prof. Meij (1982: 12), yang dimaksud dengan modal ialah kolektivitas dari barang-barang modal yang ada di neraca sebelah debet, sedangkan kekayaan adalah daya beli dari barang-barang modal tersebut, yang ada di neraca sebelah kredit.

Hipotesa Penelitian

Kebijakan kredit perbankan yaitu kebijakan yang menjelaskan mengenai tata cara pemberian kredit yang sehat, meliputi antara lain prosedur pemberian kredit yang sehat, termasuk prosedur persetujuan kredit, prosedur dokumentasi dan administrasi kredit, dan proses pengawasan kredit. Dalam kebijakan kredit diatur mengenai tata cara penilaian kualitas kredit untuk memastikan bahwa hasil penilaian kolektibilitas kredit yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bunga kredit dapat mempengaruhi peningkatan atau penurunan kredit. Sehingga hal tersebut dapat berdampak pada pertumbuha kredit UMKM. Dalam kehidupan sehari-hari kata suku bunga bukanlah sesuatu yang asing lagi. Baik itu dari pinjaman ataupun tabungan, unsur suku bunga akan selalu berada di produk-produk perbankan dan akan mempengaruhi nasabah. Jika ingin

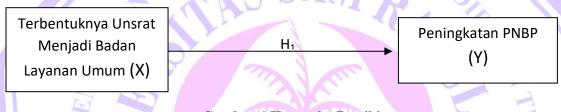
mendapatkan pinjaman yang termurah maka nasabah akan perlu mencari kredit dengan suku bunga rendah. Sedangkan jika ingin mencari tabungan paling menguntungkan maka nasabah perlu mencari tabungan bunga tertinggi. Dalam penelitian Badaruddin (2015) tentang Pengaruh Tingkat Suku Bunga Terhadap Penyaluran Kredit Konsumtif Pada PT. Bank Rakyat Indonesia tbk Cabang Sungguminasa menunjukkan bahwa bunga berpengaruh positif terhadap tingkat kredit.

Hipotesis Penelitian:

- H₀ : Diduga Dampak Kebijakan Penyaluran Kredit Kepada UMKM tidak berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Kredit di Provinsi Sulawesi Utara.
- H₁: Diduga Dampak Kebijakan Penyaluran Kredit Kepada UMKM berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Kredit di Provinsi Sulawesi Utara.

Kerangka Pemikiran

Gambar 2. tersebut memiliki dua variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen. Berikut ini adalah kerangka pemikiran dalam penelitian ini :



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Variabel terikat (dependen) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variable independen. Dalam hal ini variabel dependennya adalah Pertumbuhan Kredit (Y). Variabel bebas (independen) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Kebijakan Dampak Penyaluran Kredit

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Mengacu pada bentuk penelitian, tujuan, sifat masalah dan pendekatannya, maka metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Penelitian menggunakan penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2013).

Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan kredit yang diberikan oleh perbankan kepada UMKM sebagai variabel terikat. Sedangkan variabel bebas adalah periode PBI No. 14 tahun 2012 ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian variabel bebas pada penelitian ini adalah tahun 2012.

Definisi Operasional Variabel

Pertumbuhan kredit didefinisikan sebagai selisih antara kredit yang diberikan oleh bank umum pada periode tertentu (t) dikurangi kredit pada periode sebelumnya (t-1) dibagi dengan nilai nominal kredit periode sebelumnya (t). Rumus pertumbuhan dijabarkan di bawah ini.

Persamaan 1

Pertumbuhan kredit

KYDt = Kredit yang diberikan pada bulan observasi

KYDt−1= Kredit yang diberikan pada bulan sebelumnya

Waktu Penelitian

Periode waktu penelitian ditentukan berdasarkan ketersediaan data. Pengelompokkan penyaluran kredit khusus pada kepada UMKM pada Statistik Perbankan Indonesia seperti yang ditampilkan di laman www.bi.go.id dan www.ojk.go.id dimulai pada bulan Januari 2011. Sedangkan pada periode sebelumnya, penyaluran kredit kepada UMKM masih digabung dengan penyaluran kredit kepada MKM. Berdasarkan hal tersebut periode waktu penelitian dimulai pada bulan Februari 2011 hingga Desember 2012 untuk periode sebelum diterapkannya PBI No. 14/22/PBI/2012.

Sedangkan periode setelah PBI No.14/22/PBI/2012 dimulai dari bulan Januari 2013 hingga Desember 2017. Penetapan akhir waktu periode penelitian pada bulan Desember 2017 adalah karena kewajiban minimum pemberian kredit sebesar 5% ditetapkan harus mulai diberlakukan oleh seluruh bank pada bulan Desember 2017. Data yang digunakan adalah data bulanan.

Data

Populasi pada penelitian ini adalah jumlah seluruh kredit yang disalurkan oleh bank umum kepada UMKM di Indonesia. Data yang tersedia pada Statistik Perbankan Indonesia di laman Bank Indonesia (www.bi.go.id) dan Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id) mencakup seluruh kredit dari bank umum yang ada di Indonesia. Dengan demikian, data yang digunakan merupakan populasi penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah tehnik yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala dan fenomena yang diteliti oleh penulis. Penulis melakukan pengamatan terhadap pelayanan pada pameran pameran UMKM, layanan kredit UMKM pada bank-bank tertentu termasuk di Bank SulutGo dan kemudian mengetahui bagaimana aplikasi yang diterapkan di kantor tersebut.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan yang dilakukan antara dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai.

Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana digunakan untuk menaksir bagaiman keadaan (naik turunnya) variabel dependen. Secara matematis bentuk persamaan dari regresi linier sederhana adalah sebagai berikut:

$$Y = f(X)$$

$$Y = a + bD + e$$

Dimana:

Y = Pertumbuhan Pembiayaan UMKM

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi X

D = Penyaluran Kredit UMKM = Dummy (0=tidak ada kebijakan, 1=ada kebijakan)

e = Error

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

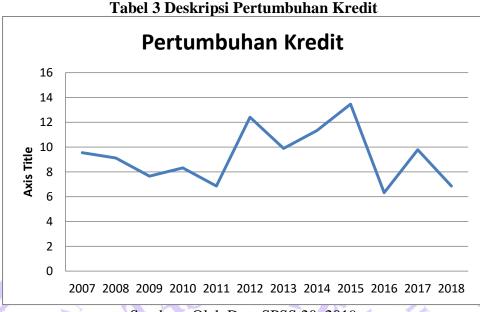




Sumber: Olah Data SPSS 20, 2019

Tabel 1 Menunjukkan Penyaluran Kredit UMKM. Dapat dilihat bahwa nilai minimum adalah sebesar 0 dan nilai maksimum sebesar 1.





Sumber: Olah Data SPSS 20, 2019

Tabel 3 Menunjukkan Deskripsi pertumbuhan kredit perbankan di Sulut tahun 2007-2018. Dapat dilithat bahwa terjadi fluktuasi pertumbuhan kredit Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2018.

Analisis Regresi Linier Sederhana

Tabel 4 Coeficient

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		В	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9.394	.836		11.233	.000
	Penyaluran Kredit UMKM	283	1.448	062	195	.849

Sumber: Olah Data SPSS 20, 2019

Persamaan Regresi Y = 9,394 - 0,283X menggambarkan bahwa variabel bebas (*independent*) Penyaluran Kredit UMKM (X) dalam model regresi tersebut dapat dinyatakan jika satu variabel independen berubah sebesar 1 (satu) dan lainnya konstan, maka perubahan variabel terikat (dependen) Pertumbuhan Kredit UMKM (Y) adalah sebesar nilai koefisien (b) dari nilai variabel independen tersebut. Konstanta (α) sebesar 9,394 memberikan pengertian bahwa jika Penyaluran Kredit UMKM (X) secara serempak atau bersama-sama tidak mengalami perubahan atau sama dengan nol (0) maka besarnya Pertumbuhan Kredit UMKM (Y) sebesar 9,394 satuan.

Jika nilai *b* yang merupakan koefisien regresi dari Penyaluran Kredit UMKM (X) sebesar - 0.283 yang artinya mempunyai pengaruh negatif terhadap variabel dependen (Y) mempunyai arti bahwa jika variabel Penyaluran Kredit UMKM (X) bertambah 1 satuan, maka Pertumbuhan Kredit UMKM (Y) juga akan mengalami penurunan sebesar 0.283 satuan dengan asumsi variabel lain tetap atau konstan.

Penyaluran Kredit UMKM (X) memiliki tingkat signifikansi p-value = 0,849 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H_o diterima dan H_a ditolak atau Penyaluran Kredit UMKM (X) tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Kredit UMKM (Y).

Pembahasan

Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. UU No. 10 tahun 1998 menyebutkan bahwa kredit adalah "penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga". Jika seseorang menggunakan jasa kredit, maka ia akan dikenakan bunga tagihan. Ketika bank memberikan pinjaman uang kepada nasabah, bank tentu saja mengharapkan uangnya kembali. Karenanya, untuk memperkecil risiko (uangnya tidak kembali), dalam memberikan kredit bank harus mempertimbangkan beberapa hal yang terkait dengan itikad baik (willingness to pay) dan kemampuan membayar (ability to pay) nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya. Hal-hal tersebut terdiri dari Character (kepribadian), Capacity (kapasitas), Capital (modal), Collateral (jaminan), dan Condition of Economy (keadaan perekonomian), atau sering disebut sebagai Analisis 5C.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitupemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang tergolong sebagai pihak yang mengalami kekurangan dana. Lembaga keuangan mikro merupakan lembaga keuangan yang berperanmenghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepadamasyarakat. Penyaluran dana kepada masyarakat yang dilakukan olehlembaga keuangan mikro ini umumnya ditujukan bagi masyarakat ekonomikecil. Penyaluran dana ini biasa disebut dengan kredit. Kata kredit berasal darikata credere yang artinya "kepercayaan", Isehingga orang yang mendapat kedit adalah orang yang menerima kepercayaan dari pihak kreditor, tentunyasetelah dilakukan penilaian atas kemampuan dan niat baiknya untukmengembalikan kredit. Penyaluran kredit oleh lembaga keuangan umumnya dalam bentukkredit konsumtif dan kredit produktif. Penyaluran kredit produktif yangdilakukan oeh lembaga keuangan mikro ini ditujukan kepada para pelakuusaha mikro dan kecil yang kekurangan dana, sedangkan untuk kreditkonsumtif digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi debitor. Tujuanutama lembaga keuangan dalam memberikan kredit kepada pelaku usahaadalah untuk membantu mengembangkan usaha yang dijalankan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwatingkat signifikansi p-value = 0,663 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H_o diterima dan H_a ditolak atau Penyaluran Kredit UMKM (X) tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Kredit UMKM (Y). artinya setiap terjadi perubahan pertumbuhan kredit tidak dipengaruhi oleh penyaluran kredit.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : Kebijakan penyaluran kredit tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan kredit UMKM di Sulawesi Utara.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis memberi saran yaitu

1 Bank Indonesia. Bank Indonesia perlu mengevaluasi secara berkala tingkat penyaluran kredit UMKM bagi perbankan serta menetapkan strategi dan kebijakan agar perbankan terdorong untuk melakukan penyaluran kredit UMKM.

- 2 Bank SulutGo. Pihak Bank agar lebih meningkatkan lagi porsi pembiayaan pada sektor Usaha UMKM dan aktif mendapatkan pelaku-pelaku UMKM pada sentra-sentra perekonomian usaha UMKM.
- 3 Pemerintah Daerah. Pemerintah sebaiknya membantu dalam hal membuka ruang bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan akses pemasaran dan sarana maupun prasarana penunjang usaha serta memudahkan untuk mendapatkan akses perijinan usaha bagi pelaku UMKM.
- 4. Untuk pihak UMKM harus mempertahankan nilai kredit yang dengan mempergunakan fasilitas kredit secara optimal bagi pengembangan usaha UMKM serta menghindari adanya resiko usaha yang dapat memperkecil pendapatan bahkan kerugian atas usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- **Bank Indonesia.** (2018). Skim Kredit Program yang Dikeluarkan Pemerintah. Retrieved from http://www.bi.go.id/id/umkm/kredit/skim/Contents/Default. aspx# KKPE
- **Beck, Thorsten; Demirguc-Kunt, Asli; Levine, R. (2005)**. SMEs, Growth, and Poverty. *Journal of Economic Growth*, 10, 199–229.
- **Depkop.** (2012). Perkembangan Data Usaha Mikro , Kecil , Menengah (UMKM) Dan Usaha Besar (UB) Perkembangan Data Usaha Mikro , Kecil , Menengah (UMKM) Dan Usaha Besar (UB). www.depkop.go.id, (1), 2011–2012.

Ernani, Hadiyati. (2011). Kreativitas dan Inovasi Berpengaruh Terhadap Kewirausahaan Usaha Kecil. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 13(1), 8–16. http://doi.org/10.9744/jmk.

Kristiyanti, M. (2012). Peran Strategis Usaha Kecil Menengah (UKM) Dalam Pembangunan Nasional. *Majalah Ilmiah INFORMATiKA*, 3(1), 63–89.

Suryana. (2013). Kewirausahaan: Kiat dan Proses Menuju Sukses. Jakarta: Salemba Empat.

